



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DPRD

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

H. Cik Ujang

Gubernur Sumatera Selatan

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini adalah media untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang maksimal serta merupakan gambaran rencana yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025-2029.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



H. APRIZAL, S.Ag, SE, M.Si
NIP. 197204081998031005

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD.....	5
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	5
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD.....	19
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Tahun 2025-2029.....	21
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Tahun 2025-2029.....	24
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	26
	4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	26
	4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	50
	4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	50
BAB V	PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai rencana yang telah disusun oleh Bapak H. Herman Deru yang telah diberikan amanah sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang dibantu Wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu H. Cik Ujang periode 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh Perangkat Daerah hingga 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
2.1	Subbag Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD
2.1.2	Sumber Daya Sekretariat DPRD
2.1.3	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat DPRD
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Tahun 2025-2029
3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
4.2	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.3	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

2.1 Subbag Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

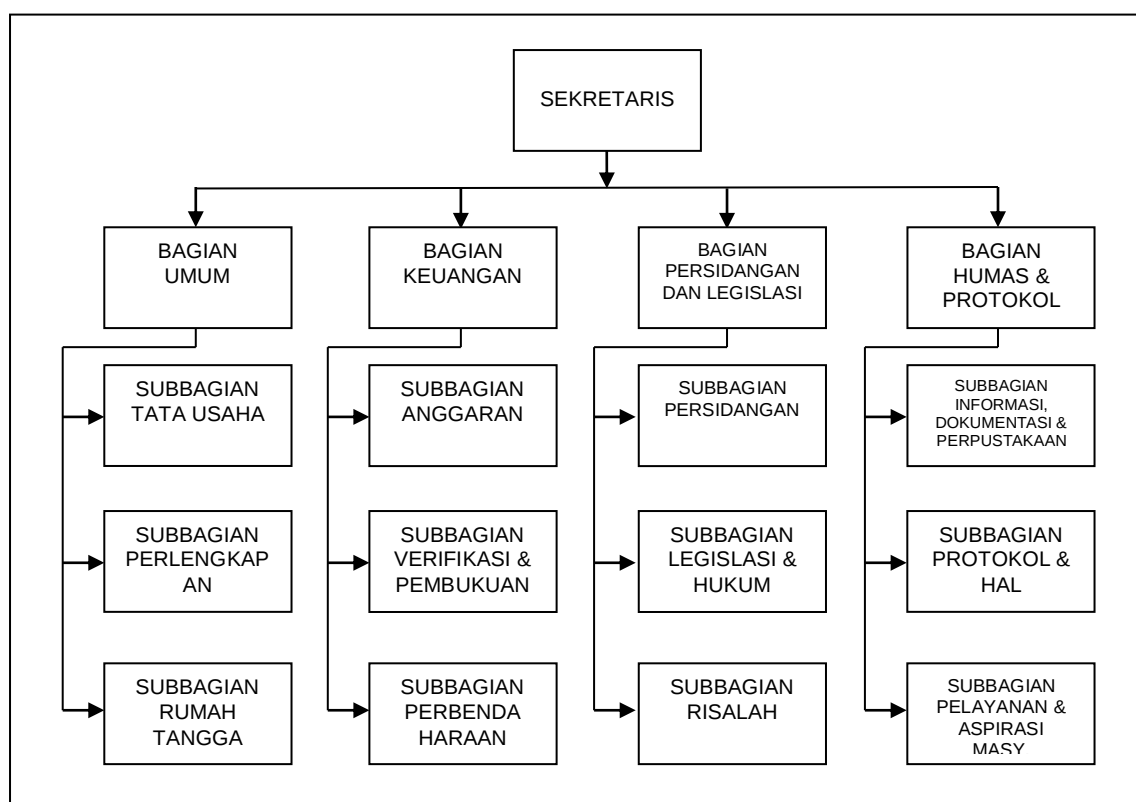
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sekretariat DPRD Provinsi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah. Adapun tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5, dimana tugas Sekretariat Dewan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Dewan dilengkapi dengan 4 (empat) bagian yang semuanya memiliki subbagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2016, disajikan berikut ini :

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Selatan



Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. Sumsel

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Uraian tugas dari setiap Bagian dan Subbagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Umum setiap tahun;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kearsipan;

- c. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah jabatan, mess, gedung kantor, keamanan, kebersihan dan keindahan;
- d. membagi tugas dan memberi petunjuk untuk Fasilitas sarana prasarana rapat/pertemuan, sarana prasarana di ruang kerja Pimpinan Dewan, Anggota, komisi, fraksi , Sekretaris dan Sekretariat DPRD;
- e. membagi tugas dan memberi petunjuk melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kendaraan dinas operasional, BBM, transportasi peninjauan/pertemuan, Perbaikan dan pemeliharaan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan inventarisasi penghapusan barang - barang yang keadaannya rusak berat;
- g. mengevaluasi keamanan dan ketertiban, kebersihan gedung kantor, rumah jabatan dan mess DPRD;
- h. memberi Petunjuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah;
- i. mengevaluasi seluruh rencana operasional program;
- j. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- k. membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- l. melaporkan kegiatan realisasi fisik per triwulan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Umum terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Perlengkapan
 - c. Subbagian Rumah Tangga
2. Bagian Persidangan dan Legislasi

Bagian Persidangan dan Legislasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan persidangan paripurna dan paripurna istimewa, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan

Kehormatan, Komisi-Komisi dan Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan juga termasuk rapat Pansus.

Bagian persidangan dan legislasi terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Persidangan
- b. Subbagian Legislasi dan Hukum
- c. Subbagian Risalah

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, yang meliputi:

- a. merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Keuangan setiap tahun;
- b. merencanakan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam Rencana Kerja (Renja) tahun yang berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD Prov.Sumsel sebagai bahan penyusunan RKA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Selatan;
- c. membagi Tugas Bagian Keuangan ke Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan tupoksi agar tugas-tugas di Bagian Keuangan berjalan lancar dan tertib;
- d. memberi petunjuk kepada Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi agar para Kasubbag dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan;
- e. menyelia, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan disposisi (perintah) agar dapat diteruskan/ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- f. memerintahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan agar pertanggungjawaban sesuai berjalan dengan lancar dan benar;
- g. mengevaluasi Tugas di Subbag Anggaran, Subbag Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi sebagai bahan untuk rencana kerja selanjutnya;

- h. melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tupoksi Bagian Keuangan sebagai bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu:

- a. Subbagian Anggaran
 - b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
 - c. Subbagian Perbendaharaan
4. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
- b. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
- c. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ditetapkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan disajikan sebagai berikut :

- 1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Membantu menyiapkan Raperda;
 - b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda;
 - c. Membantu dalam memberi masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda;

- d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah.
2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang penganggaran;
 - b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya sebagai perbandingan.
3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan;
 - b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan;
 - c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan fungsi guna membantu Dewan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu DPRD guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program

dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan dengan jumlah 92 orang yang terdiri dari PNS, CPNS dan PPPK. Dari data pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Strata 2 (S2) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah yang terbanyak, yaitu berjumlah 42 orang. Adapun urutan pegawai berdasarkan golongan, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasar Golongan (s.d. bulan Mei 2025)

Golongan	ASN	Laki-Laki	Perempuan
IV/c	1	1	0
IV/b	4	2	2
IV/a	16	5	11
III/d	26	15	11
III/c	13	10	3
III/b	11	9	2
III/a	13	11	2
II/d	2	2	0
II/c	3	2	1
IX	3	0	3
JUMLAH	92	57	35

Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. Sumsel

Tabel 2.2
ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasar Tingkat Pendidikan (s.d. bulan Mei 2025)

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-Laki	Perempuan
Strata 2	42	22	20
Strata 1	39	25	14
Diploma 3	1	1	0
SMA/SMU	10	9	1
Jumlah	92	57	35

Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. Sumsel

Dalam jajaran organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumnya, terdapat 4 Bagian dan dalam bagian terdapat beberapa Subbagian, yang masing-masing terdapat rincian sumber daya manusia beserta latar belakang pendidikannya. Selain ASN Sekretariat DPRD juga memiliki tenaga non ASN.

Tabel 2.3
PPPK Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasar Tingkat Pendidikan (s.d. bulan Mei 2025)

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-Laki	Perempuan
Strata 2	2	0	2
Strata 1	84	41	43
Diploma 3	25	16	9
SMA/SMU	63	52	11
SMP	3	3	0
SD	1	1	0
Jumlah	178	113	65

Tabel 2.4
Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Berdasar Pemangku Jabatan (s.d. bulan Mei 2025)

Nama Jabatan	Jumlah Ideal Pemangku Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Jumlah Kekurangan Pegawai
Sekretaris DPRD	1	1	0
Kepala Bagian Umum	113	56	57
Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi	56	40	16
Kepala Bagian Keuangan	45	24	21
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	75	40	35
Jumlah	290	161	129

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD mengelola aset dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah
 - a. Tanah yang dikelola Sekretariat DPRD ada lima persil, dengan luas keseluruhan 65.355 m² senilai Rp.158.778.590.000,-

- b. Untuk Tanah Bangunan kantor DPRD seluas 49.967 m² beralamat Jln. Kapten A. Rivai Status hak pakai, dengan nomor sertifikat 08-04-1986 No.332, berasal dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.
- c. Untuk rumah dinas pimpinan dan mess, Sekretariat mengelola 4 persil dengan alamat Jln.Lingkar Istana dan 3 persil beralamat di Jln. Demang Lebar Daun Palembang. Adapun luas tanah rumah tersebut masing-masing 7.925 m², 2.486 m², 2.492 m² dan 2.485 m², dengan nomor sertifikat 29-04-1980 nomor 255/P, nomor 08-04-1986 nomor 335, nomor sertifikat 10-11-1995 (397) dan nomor sertifikat 10-11-1995 nomor 398, semua berasal dari Pemda Sumatera Selatan.

2. Gedung

Bangunan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri :

- a. Gedung Paripurna ada 3 lantai, terdiri dari lantai dasar terdapat Ruang PPID, Ruang Bagian Humas dan Protokol, Ruang Perpustakaan, Ruang Olahraga, Ruang Musik, Ruang Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan di lantai atas terdiri dari Ruang Pimpinan, Ruang Paripurna, dan Ruang Kerja Sekwan, sedangkan di lantai 3 ada Ruang Serba Guna.
- b. Gedung Banggar ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk ruang Kerja Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Tata Usaha, Ruang Bagian Persidangan dan Legislasi dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Anggaran.
- c. Gedung Komisi ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk Ruang Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasdem, Gudang dan Ruang Bagian Keuangan dan di lantai atas terdiri dari Ruang Badan Musyawarah, Ruang Komisi I, Ruang Komisi II, Ruang Komisi III dan Ruang Badan Kehormatan.
- d. Gedung Fraksi ada 2 lantai, di lantai dasar terdapat Ruang Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional dan di lantai atas terdiri dari Ruang Komisi IV, Ruang Komisi V, Ruang Tenaga Ahli dan Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- e. Gedung A ada 2 lantai yang merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- f. Gedung Media Center 2 lantai yang terdiri dari lantai dasar Ruang Media Center, Ruang Kantin dan lantai atas Ruang Ikatri.
 - g. Gedung B ada 2 lantai yang merupakan Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 - h. Gedung C ada 2 lantai, yang terdiri dari lantai dasar Garasi dan lantai atas Ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 - i. Rumah Dinas Ketua terletak di Jln. Lingkar Istana (Demang Lebar Daun) dengan Luas 972 m².
 - j. Rumah Dinas Wakil-wakil Ketua ada 3 Rumah Dinas, dengan total luas 972 m².
 - k. Mess dengan luas sejumlah 434 m².
 - l. Masjid Al-Ra'iyah sebanyak 2 lantai.
 - m. Papan Billboard dan Videotron sebanyak 11 unit.
3. Peralatan dan Mesin
- a. Alat-alat besar senilai Rp.184.070.000,-
 - b. Alat-alat Angkutan yang terdiri dari motor beroda dua dan kendaraan beroda empat senilai Rp.40.627.224.000,-
 - c. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp.1.895.395.692,-
 - d. Alat pertanian senilai Rp.102.325.000,-
 - e. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp.122.564.664.035,-
 - f. Alat studio dan alat komunikasi senilai Rp.19.241.153.049,-
 - g. Alat-alat kedokteran senilai Rp.710.208.000,-
 - h. Alat laboratorium senilai Rp.1.993.709.750,-
 - i. Komputer senilai Rp.9.665.181.372,-
4. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang dikelola adalah Buku Perpustakaan dan Website DPRD dengan alamat Website dprd.sumselprov.go.id.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase layanan administrasi yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun semua indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mencapai target. Hal ini didorong oleh Sekretariat DPRD yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan DPRD dengan menyediakan fasilitas-fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan lain-lain, memfasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan dokumentasi kunjungan serta kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan, khusus pada aspek pendanaan dalam pelayanan Perangkat Daerah pada level program, dimana kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang periode perencanaan sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk tabel 2.6.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	196.773.606.000	-	-	-	-	162.680.758.275	-	-	-	-	82,67					(100)	(100)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139.143.079.600	-	-	-	-	119.044.648.973	-	-	-	-	85,56	-	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.606.336.200	-	-	-	-	29.540.892.152	-	-	-	-	80,70	-	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.983.366.200	-	-	-	-	2.531.223.250	-	-	-	-	84,84	-	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	348.100.000	-	-	-	-	328.112.400	-	-	-	-	94,26	-	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.124.000	-	-	-	-	8.922.600	-	-	-	-	18,16	-	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	17.643.600.000	-	-	-	-	11.226.958.900	-	-	-	-	63,63	-	-	-	-	(100)	(100)
Belanja Tidak Langsung	83.455.645.000	-	-	-	-	71.817.165.378	-	-	-	-	86,05	-	-	-	-	(100)	(100)
Belanja Pegawai	83.455.645.000	-	-	-	-	71.817.165.378	-	-	-	-	86,05	-	-	-	-	(100)	(100)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	198.203.625.123	215.571.806.466	216.567.142.774	213.456.614.668	-	165.492.778.992	200.787.277.901	198.873.649.308	195.746.363.411	-	83,50	93,14	91,83	91,70	2,60	6,27
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	107.993.120.000	168.501.892.523	230.362.455.600	185.786.445.432	-	104.926.334.848	158.687.511.586	189.319.789.423	164.780.380.824	-	97,16	94,18	82,18	88,69	24,46	19,19
Jumlah	280.229.251.000	306.196.745.123	384.073.698.989	446.929.598.374	399.243.060.100	234.497.923.653	270.419.113.840	359.474.789.487	388.193.438.731	360.526.744.235	83,68	88,32	93,60	86,86	90,30	10,10	12,28

Pada tahun 2020 nomenklatur program masih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Sejak tahun 2021, seluruh perangkat daerah menyusun program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga program yang ada di Sekretariat DPRD hanya terdiri dari 2 program. Pada umumnya realisasi keuangan selama 5 tahun ini sudah baik. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada tahun 2023 ada penurunan realisasi keuangan karena adanya efisiensi dan adanya pengakuan utang perangkat daerah. Kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan tetapi ada penundaan pembayaran ke tahun berikutnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh *stakeholder* terkait, khususnya masyarakat.

Beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih sama dengan masalah yang telah timbul di tahun sebelumnya. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan perangkat daerah, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkunagn Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD memberikan fasilitas agar peran DPRD dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.	Tuntutan untuk menerapkan e-governance dan digitalisasi layanan sekretariat , seperti e-budgeting, e-legislasi, dan sistem informasi kinerja DPRD	Dampak dari UU Cipta Kerja, RUU Daerah Otonomi Baru (DOB), atau regulasi pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap peran DPRD daerah	Kontestasi politik menjelang Pemilu atau Pilkada berdampak pada dinamika kegiatan dewan, dan menuntut Sekretariat untuk netral, profesional , dan siap mendukung agenda dewan secara administratif	Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Sekretariat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi dan tepat lokasi. Pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa jabatan 2025-2029 telah menetapkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan visi misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029, yaitu :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA“

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, telah dimiliki 7 (Tujuh) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD telah mengakomodir Misi ke 6 (Enam) dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yakni : “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merumuskan tujuan yang selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Guna mencapai tujuan tersebut indikator yang akan diukur adalah tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Setiap tahun Sekretariat DPRD akan melakukan pengukuran tingkat kepuasan tersebut dengan metode kuantitatif berupa kuesioner yang diberikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan teknik merumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

NSPK dan Tujuan RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	85%	87%	89%	90%	91%	92%	Target menyesuaikan dengan kondisi terpilihnya DPRD periode 2025-2029
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi keuangan DPRD	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan DPRD	Persentase kegiatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Umum, Persidangan dan Humas

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jendral DPR. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Strategi Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk menetapkan hal tersebut dapat digunakan penahapan renstra yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing	Mengevaluasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing	Optimalisasi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada DPRD	Optimalisasi lanjutan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada DPRD	Pegawai sudah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada DPRD
Memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi	Memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi	Melakukan evaluasi pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi	Mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi	Mengoptimalkan lebih lanjut pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi
Memfasilitasi kegiatan Penerapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan kegiatan Sosialisasi Raperda dan Perda ke masyarakat	Melakukan evaluasi dalam memfasilitasi kegiatan Penerapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan kegiatan Sosialisasi Raperda dan Perda ke masyarakat	Optimalisasi dalam memfasilitasi kegiatan Penerapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan kegiatan Sosialisasi Raperda dan Perda ke masyarakat	Optimalisasi lanjutan dalam memfasilitasi kegiatan Penerapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan kegiatan Sosialisasi Raperda dan Perda ke masyarakat	Fasilitasi kegiatan Penerapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan kegiatan Sosialisasi Raperda dan Perda ke masyarakat telah sesuai dengan peraturan yang

				berlaku
--	--	--	--	---------

Arah kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Aarah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Memberi kesempatan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar	
			Menggunakan website, media sosial, ruang PPID dan mengaktifkan JDIH untuk menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan masyarakat	
			Melakukan revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja yang akan direncanakan Sekretariat DPRD. Adapun penyajiannya menggunakan tabel berikut ini:

Teknik 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi keuangan DPRD	Terselenggaranya pemenuhan pelayanan kinerja DPRD yang cepat, tepat, dan akuntabel		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		
					Ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan		
					Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program
					Persentase administrasi keuangan DPRD yang difasilitasi tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keg
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub keg
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub keg
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub keg

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sub keg
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub keg
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub keg
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub keg
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub keg
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Sub keg
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub keg

					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Sub keg
				Tersedianya dukungan administrasi keuangan DPRD	Persentase administrasi keuangan DPRD yang difasilitasi tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keg
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub keg
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub keg
				Tersedianya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Keg
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sub keg
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sub keg
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sub keg
		Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan DPRD			Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar		
			Anggota DPRD yang terpenuhi penunjang kerjanya		Persentase Anggota DPRD yang terpenuhi penunjang kerjanya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program
			Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keg

				Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub keg
					Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub keg
					Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub keg
					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub keg
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub keg
					Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub keg
				Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keg
					Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sub keg
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub keg
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub keg
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub keg

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub keg
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub keg
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub keg
				Terlaksananya layanan administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	Layanan Administrasi DPRD	Keg
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sub keg
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sub keg
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sub keg
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sub keg
				Terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keg
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub keg
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub keg
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub keg
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub keg
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub keg

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub keg
					Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Sub keg
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub keg
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub keg
				Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub keg
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub keg
					Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Sub keg
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub keg
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub keg
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub keg
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub keg
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub keg
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub keg
				Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub keg
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub keg
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub keg
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub keg
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub keg

					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Sub keg
					Persentase kegiatan yang terfasilitasi		
				Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetasan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program
					Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Keg
						Pembahasan KUA dan PPAS	Sub keg
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub keg
						Pembahasan APBD	Sub keg
						Pembahasan Perubahan APBD	Sub keg
						Pembahasan Laporan Semester	Sub keg
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sub keg
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program
				Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Keg

				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sub keg
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	Sub keg
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sub keg
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Sub keg
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sub keg
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sub keg
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program
				Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Keg
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sub keg
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sub keg

					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sub keg
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sub keg
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sub keg
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sub keg
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas DPRD	Keg
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Sub keg
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sub keg
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sub keg
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sub keg

				Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Keg
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sub keg
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Sub keg
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sub keg
				Terlaksananya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Keg
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sub keg
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sub keg
				Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Keg
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Sub keg
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sub keg
				Terfasilitasinya pelaksanaan tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	Fasilitasi Tugas DPRD	Keg
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sub keg
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sub keg

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sub keg
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Sub keg

Penjabaran rencana program, kegiatan, subkegiatan, target dan pagu indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subk egiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProS N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	99,87%	100%	239.879.135.78 8,00	100%	225.843.834.00 0,00	100%	234.877.587.36 0,00	100%	234.772.690.85 4,40	100%	236.593.598.48 8,58	100%	239.010.342.42 8,12	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersedia	100%	100%	2.010.000.000,00	100%	1.810.000.000,00	100%	2.649.000.000,00	100%	2.644.000.000,00	100%	2.908.400.000,00	100%	2.770.270.000,00	- Melanjutkan dan Meningkatka n Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani.	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokum en	50.000.000,00	1 Dokum en	50.000.000,00	1 Dokum en	55.000.000,00	1 Dokum en	55.000.000,00	1 Dokum en	60.500.000,00	2 Dokum en	63.525.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokum en	50.000.000,00	1 Dokum en	50.000.000,00	1 Dokum en	55.000.000,00	1 Dokum en	55.000.000,00	1 Dokum en	60.500.000,00	1 Dokum en	63.525.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokum en	50.000.000,00	1 Dokum en	50.000.000,00	1 Dokum en	55.000.000,00	1 Dokum en	55.000.000,00	1 Dokum en	60.500.000,00	1 Dokum en	63.525.000,00	- Mengembang kan Meritokrasi, dengan memberikan kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi.	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1 Dokum en	30.000.000,00	1 Dokum en	30.000.000,00	1 Dokum en	33.000.000,00	1 dokume n	33.000.000,00	1 dokume n	36.300.000,00	1 dokume n	38.115.000,00		

	Dokumen DPA-SKPD															
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokum en	30.000.000,00	1 Dokum en	30.000.000,00	1 Dokum en	33.000.000,00	1 dokume n	33.000.000,00	1 dokume n	36.300.000,00	1 dokume n	38.115.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	6 Lapora n	1.700.000.000,00	6 Lapora n	1.500.000.000,00	6 laporan	2.310.000.000,00	6 laporan	2.310.000.000,00	6 laporan	2.541.000.000,00	6 laporan	2.400.000.000,00	- Menerapkan Sistem Berbasis Elektronik, Keamanan Cyber dan Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM.	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1 Lapora n	100.000.000,00	1 Lapora n	100.000.000,00	1 Laporan	105.000.000,00	2 laporan	100.000.000,00	2 laporan	110.000.000,00	2 laporan	100.000.000,00		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-		-	1 Data	500.000,00	1 data	500.000,00	1 data	550.000,00	1 data	577.500,00	- Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	1 BA	500.000,00	1 BA	500.000,00	1 BA	550.000,00	1 BA	577.500,00		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-		-	1 Dokum en	500.000,00	1 dokume n	500.000,00	1 dokume n	550.000,00	1 dokume n	577.500,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			-		-	1 Dokum en	500.000,00	1 dokume n	500.000,00	1 dokume n	550.000,00	1 dokume n	577.500,00		
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-		-	1 BA	500.000,00	1 BA	500.000,00	1 BA	550.000,00	1 BA	577.500,00		

Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-		-		-	1 Substansi	500.000,00	1 substansi	500.000,00	1 substansi	550.000,00	1 substansi	577.500,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	16.366.361.000,00	100%	20.685.803.000,00	100%	21.226.862.000,00	100%	21.652.229.000,00	100%	22.103.379.000,00	100%	22.451.527.000,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang / Desember	162/14 Orang/ Bulan	16.276.983.000,00	162/14 Orang/ Bulan	20.593.923.000,00	162/14 Orang/ Bulan	21.005.802.000,00	162/14 Orang/ Bulan	21.425.919.000,00	162/14 Orang/ Bulan	21.854.438.000,00	162/14 Orang/ Bulan	22.291.527.000,00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	2 Dokumen	39.378.000,00	2 Dokumen	41.880.000,00	2 dokumen	168.560.000,00	2 dokumen	168.560.000,00	2 dokumen	185.416.000,00	2 dokumen	100.000.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	52.500.000,00	2 Laporan	57.750.000,00	2 Laporan	63.525.000,00	2 Laporan	60.000.000,00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	1.145.600.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	1.502.000.000,00	100%	1.652.000.000,00	100%	1.817.400.000,00	100%	1.817.400.000,00		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-					1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	600.000,00	1 Dokumen	600.000,00		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	4 Dokumen	850.000.000,00	4 Dokumen	850.000.000,00	4 Dokumen	999.500.000,00	4 Dokumen	1.099.500.000,00	4 Dokumen	1.209.400.000,00	4 Dokumen	1.209.400.000,00		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-					1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	600.000,00	1 Laporan	600.000,00		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-					1 Kali	500.000,00	1 Kali	500.000,00	1 Kali	600.000,00	1 Kali	600.000,00		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-					1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	600.000,00	1 Laporan	600.000,00		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	295.600.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	1 Laporan	550.000.000,00	1 Laporan	605.000.000,00	1 Laporan	605.000.000,00		

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-					1 Kali	500.000,00	1 Kali	500.000,00	1 Kali	600.000,00	1 kali	600.000,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	840.000.000,00	100%	640.000.000,00	100%	967.000.000,00	100%	973.600.000,00	100%	980.860.000,00	100%	988.846.000,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-					1 Unit	1.000.000,00	1 Unit	1.100.000,00	1 Unit	1.210.000,00	1 Unit	1.331.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	200.000.000,00			1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokum en	20.000.000,00	1 Dokum en	20.000.000,00	1 Dokum en	21.000.000,00	1 Dokum en	23.100.000,00	1 Dokum en	25.410.000,00	1 Dokum en	27.951.000,00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokum en	20.000.000,00	1 Dokum en	20.000.000,00	1 Dokum en	22.000.000,00	1 Dokum en	24.200.000,00	1 Dokum en	26.620.000,00	1 Dokum en	29.282.000,00		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-					1 Kali	22.000.000,00	1 Kali	24.200.000,00	1 Kali	26.620.000,00	1 Kali	29.282.000,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 orang	104 orang	600.000.000,00	104 orang	600.000.000,00	104 Orang	700.000.000,00	104 Orang	700.000.000,00	104 Orang	700.000.000,00	104 Orang	700.000.000,00		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-		-	1 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-		-	1 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00	1 Orang	500.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	87.526.040.000,00	100%	49.616.440.000,00	100%	53.687.458.000,00	100%	59.550.144.000,00	100%	48.368.200.000,00	100%	66.268.620.000,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	3 Paket	600.000.000,00	4 Paket	700.000.000,00	4 Paket	800.000.000,00	4 Paket	800.000.000,00	4 Paket	800.000.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20 Paket	20.550.000.000,00	10 Paket	13.100.000.000,00	15 Paket	16.351.730.000,00	15 Paket	17.328.843.000,00	15 Paket	15.000.000.000,00	15 Paket	15.000.000.000,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	40 Paket	45.227.100.000,00	24 Paket	20.450.000.000,00	20 Paket	16.000.000.000,00	20 Paket	20.000.000.000,00	10 Paket	10.102.000.000,00	20 Paket	30.000.000.000,00		

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	100 Paket	5.046.440.000,00	100 Paket	4.696.440.000,00	100 Paket	5.635.728.000,00	100 Paket	6.199.301.000,00	100 Paket	7.000.000.000,00	100 Paket	7.000.000.000,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	5 Paket	882.500.000,00	5 Paket	1.000.000.000,00	5 Paket	1.100.000.000,00	5 Paket	1.210.000.000,00	5 Paket	1.331.000.000,00	5 Paket	1.331.000.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14 Dokum en	1.045.000.000,00	14 Dokum en	1.045.000.000,00	14 Dokum en	1.100.000.000,00	14 Dokum en	1.210.000.000,00	14 Dokum en	1.331.000.000,00	14 Dokum en	1.331.000.000,00		
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	-					1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	11.000.000,00	1 Paket	12.100.000,00	1 Paket	13.310.000,00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	400 Laporan	300 Lapora n	14.000.000.000,00	300 Lapora n	8.000.000.000,00	400 Laporan	12.000.000.000,00	400 Lapora n	12.000.000.000,00	400 Lapora n	12.000.000.000,00	400 Lapora n	10.000.000.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-					1 Kali	10.000.000,00	1 Kali	11.000.000,00	1 Kali	12.100.000,00	1 Kali	13.310.000,00		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokum en	75.000.000,00	1 Dokum en	75.000.000,00	1 Dokum en	80.000.000,00	1 Dokum en	80.000.000,00	1 Dokum en	80.000.000,00	1 Dokum en	80.000.000,00		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 Dokum en	200.000.000,00	3 Dokum en	650.000.000,00	3 Dokum en	700.000.000,00	3 Dokum en	700.000.000,00	3 Dokum en	700.000.000,00	3 Dokum en	700.000.000,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	-	100%	1.744.995.000,00	100%	5.500.500.000,00	100%	800.500.000,00	100%	4.010.000.000,00	100%	791.000.000,00		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		-		-					1 Unit	3.000.000.000,00	1 Unit	750.000.000,00		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			1 Unit	944.995.000,00	2 Unit	3.000.000.000,00			4 Unit	160.000.000,00	1 Unit	40.000.000,00		
Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	-					1 Unit	500.000.000,00								
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			2 unit	800.000.000,00	1 unit	2.000.000.000,00	1 unit	800.000.000,00	1 unit	800.000.000,00	1 unit	500.000,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-					1 Unit	500.000,00	1 Unit	500.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	500.000,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	20.893.910.000,00	100%	27.726.958.000,00	100%	28.732.038.000,00	100%	29.821.773.000,00	100%	30.962.473.000,00	100%	30.962.473.000,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Lapora n	30.000.000,00	4 Lapora n	30.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	2 Lapora n	50.000.000,00	2 Lapora n	50.000.000,00	2 Lapora n	50.000.000,00		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.635.000.000,00	12 Laporan	5.633.000.000,00	12 Laporan	6.196.300.000,00	12 Laporan	6.815.930.000,00	12 Laporan	7.497.523.000,00	12 Laporan	7.497.523.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-					1 laporan	500.000,00	1 laporan	500.000,00	1 laporan	500.000,00	1 laporan	500.000,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.228.910.000,00	12 Laporan	22.063.958.000,00	12 Laporan	22.505.238.000,00	12 Laporan	22.955.343.000,00	12 Laporan	23.414.450.000,00	12 Laporan	23.414.450.000,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	47.269.314.788,00	100%	50.479.615.000,00	100%	47.429.161.360,00	100%	43.510.500.854,40	100%	50.609.673.488,58	100%	38.146.493.428,12		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-		-	1 Unit	500.000,00	1 Unit	500.000,00	1 Unit	500.000,00	1 Unit	500.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	2.900.000.000,00	46 Unit	3.261.020.000,00	46 Unit	4.300.000.000,00	46 Unit	4.500.000.000,00	46 Unit	5.000.000.000,00	46 Unit	5.000.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	33.918.914.788,00	23 Unit	35.292.995.000,00	23 Unit	30.000.001.360,00	23 Unit	25.000.000.854,40	23 Unit	30.199.173.488,58	23 Unit	18.294.993.428,12		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	10.450.400.000,00	100 Unit	11.925.600.000,00	100 Unit	13.118.160.000,00	100 Unit	13.500.000.000,00	100 Unit	14.850.000.000,00	100 Unit	14.850.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-					2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	10.000.000,00	1 Unit	500.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-					1 Unit	500.000,00	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	550.000.000,00	1 Unit	500.000,00		
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	99,53%	100%	60.307.910.000,00	100%	68.367.023.000,00	100%	69.612.568.000,00	100%	70.426.944.000,00	100%	71.072.713.000,00	100%	71.072.713.000,00		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75 orang/Desember	75 Orang/14 bulan	55.745.410.000,00	75 Orang/14 bulan	63.304.523.000,00	75 Orang/14 bulan	63.937.568.000,00	75 Orang/14 bulan	64.576.944.000,00	75 Orang/14 bulan	65.222.713.000,00	75 Orang/14 bulan	65.222.713.000,00		

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	4.000.000.000,00	2 Paket	4.500.000.000,00	4 Paket	5.000.000.000,00	4 Paket	5.100.000.000,00	4 Paket	5.100.000.000,00	4 Paket	5.100.000.000,00		
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	17 orang	75 Orang	562.500.000,00	75 Orang	562.500.000,00	75 orang	675.000.000,00	75 orang	750.000.000,00	75 orang	750.000.000,00	75 orang	750.000.000,00		
Layanan Adminstrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	100,00%	100%	3.520.000.000,00	100%	3.523.000.000,00	100%	3.571.000.000,00	100%	3.741.000.000,00	100%	3.760.500.000,00	100%	3.741.000.000,00		
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen					1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	20.000.000,00	1 Dokum en	500.000,00		
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-					1 Laporan	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	5 Lapora n	280.000.000,00	5 Lapora n	283.000.000,00	5 Laporan	330.000.000,00	5 Lapora n	500.000.000,00	5 Lapora n	500.000.000,00	5 Lapora n	500.000.000,00		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	384 Paket	144 Paket	3.240.000.000,00	144 Paket	3.240.000.000,00	144 Paket	3.240.000.000,00	144 Paket	3.240.000.000,00	144 Paket	3.240.000.000,00	144 Paket	3.240.000.000,00		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	155.591.771.448,00	100%	199.158.274.812,00	100%	219.074.102.293,20	100%	220.481.512.522,52	100%	222.529.663.774,77	100%	226.782.630.152,25		
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100%	100%	1.380.000.000,00	100%	14.506.000.000,00	100%	15.435.000.000,00	100%	15.560.000.000,00	100%	15.580.000.000,00	100%	15.710.000.000,00		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	2 Dokum en	135.000.000,00	2 Dokum en	135.000.000,00	2 Dokum en	175.000.000,00	2 Dokum en	200.000.000,00	2 Dokum en	200.000.000,00	2 Dokum en	200.000.000,00		
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	20 Dokumen	3 Dokum en	1.160.000.000,00	3 Dokum en	1.160.000.000,00	3 Dokum en	1.200.000.000,00	3 Dokum en	1.200.000.000,00	3 Dokum en	1.200.000.000,00	3 Dokum en	1.200.000.000,00		
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-			1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00		
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-			1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00	1 Dokum en	5.000.000,00		
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 Dokum en	85.000.000,00	1 Dokum en	85.000.000,00	1 Dokum en	100.000.000,00	1 Dokum en	200.000.000,00	1 Dokum en	220.000.000,00	1 Dokum en	350.000.000,00		
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-			18.750 Orang	13.125.000.000,00	18.750 Orang	13.950.000.000,00	18.750 Orang	13.950.000.000,00	18.750 Orang	13.950.000.000,00	18.750 Orang	13.950.000.000,00		
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	185.000.000,00	100%	187.500.000,00	100%	290.500.000,00	100%	350.500.000,00	100%	350.500.000,00	100%	350.500.000,00		

Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-			1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00		
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-			1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00		
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00		
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00		
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-					1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00		
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	1 Dokumen	95.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	-	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-			1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen			1 Lapora n	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00		
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	42.945.648.200,0 0	100%	53.585.048.400,0 0	100%	74.084.500.000,0 0	100%	75.584.500.000,0 0	100%	77.463.151.252,0 0	100%	76.132.500.000,0 0		
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen			1 Dokum en	30.000.000,00		-		-	1 Dokum en	1.830.651.252,00	1 Dokum en	500.000.000,00		
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	2 Dokum en	4.209.355.200,00	2 Dokum en	5.170.548.400,00	2 dokume n	6.000.000.000,00	2 dokume n	6.000.000.000,00	2 dokume n	6.000.000.000,00	2 dokume n	6.000.000.000,00		
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	56 Orang	55 Orang	3.960.000.000,00	55 Orang	3.960.000.000,00	55 Orang	3.960.000.000,00	55 Orang	3.960.000.000,00	55 Orang	3.960.000.000,00	55 Orang	3.960.000.000,00		
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	8 Orang	384.000.000,00	8 Orang	384.000.000,00	8 Orang	384.000.000,00	8 Orang	384.000.000,00	9 Orang	432.000.000,00	9 Orang	432.000.000,00		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokum en	1.950.000.000,00	6 Dokum en	1.250.000.000,00	6 Dokum en	3.000.000.000,00	6 Dokum en	3.500.000.000,00	6 Dokum en	3.500.000.000,00	6 Dokum en	3.500.000.000,00		
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	500.000,00	1 Dokum en	500.000,00		
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	50 Dokumen	50 Dokum en	32.442.293.000,0 0	50 Dokum en	42.790.000.000,0 0	40 Dokum en	60.740.000.000,0 0	40 Dokum en	61.740.000.000,0 0	40 Dokum en	61.740.000.000,0 0	40 Dokum en	61.740.000.000,0 0		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	100%	36.995.000.000,0 0	100%	40.720.500.000,0 0	100%	28.410.500.000,0 0	100%	28.440.500.000,0 0	100%	28.440.500.000,0 0	100%	28.440.500.000,0 0		
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-			1 Lapora n	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokum en	95.000.000,00	1 Dokum en	95.000.000,00	1 Dokum en	120.000.000,00	1 Dokum en	150.000.000,00	1 Dokum en	150.000.000,00	1 Dokum en	150.000.000,00		
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	3 Dokum en	36.900.000.000,0 0	3 Dokum en	38.000.000.000,0 0	2 Dokum en	25.500.000.000,0 0	2 Dokum en	25.500.000.000,0 0	2 Dokum en	25.500.000.000,0 0	2 Dokum en	25.500.000.000,0 0		
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-			3.750 Orang	2.625.000.000,00	3.750 Orang	2.790.000.000,00	3.750 Orang	2.790.000.000,00	3.750 Orang	2.790.000.000,00	3.750 Orang	2.790.000.000,00		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	-	100%	-	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	150.500.000,00	100%	150.500.000,00		
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-			1 Lapora n	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	150.000.000,00	1 Lapora n	150.000.000,00		
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-			1 Lapora n	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00	1 Lapora n	500.000,00		
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah	-			100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00		

Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-			1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00		
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-			1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00		
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100%	100%	74.086.123.248,00	100%	90.153.226.412,00	100%	100.847.602.293,20	100%	100.540.012.522,52	100%	100.540.012.522,77	100%	105.993.630.152,25		
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	2 Dokumen	74.086.123.248,00	2 Dokumen	90.153.226.412,00	3 Dokumen	100.845.602.293,20	3 Dokumen	100.538.012.522,52	3 Dokumen	100.538.012.522,77	3 Dokumen	105.991.630.152,25		
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-					1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-					1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00		
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-					1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-					1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00		
	JUMLAH			395.470.907.236,00		425.002.108.812,00		453.951.689.653,20		455.254.203.376,92		459.123.262.263,35		465.792.972.580,37		

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa terdapat 2 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Program yang dilaksanakan khusus oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Poogram Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Keg
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sub keg
			Pembahasan Rancangan Perda	Sub keg
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sub keg
			Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Sub keg
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sub keg
			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sub keg
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Keg
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sub keg
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub keg
			Pembahasan APBD	Sub keg
			Pembahasan Perubahan APBD	Sub keg
			Pembahasan Laporan Semester	Sub keg
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sub keg
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Keg
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sub keg
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sub keg

			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sub keg
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sub keg
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sub keg
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sub keg
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sub keg
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sub keg
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Keg
			Orientasi DPRD	Sub keg
			Pendalaman Tugas DPRD	Sub keg
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sub keg
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sub keg
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sub keg
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Sub keg
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sub keg
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Keg
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sub keg
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sub keg
			Pelaksanaan Reses	Sub keg
			Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sub keg
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Keg
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Sub keg
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Sub keg
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Keg
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Sub keg
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sub keg
			Fasilitasi Tugas DPRD	Keg
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sub keg

			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sub keg
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sub keg
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sub keg
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Sub keg

4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	98,67	85	87	89	90	91	92	Target menyesuaikan dengan kondisi terpilihnya DPRD periode 2025-2029

4.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada bagian ini dikemukakan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari indikator outcome serta indikator lain yang relevan dengan urusan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Gambaran tentang IKK tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase terlaksananya kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	0	0	30	30	30	40	
4	Persentase anggota Dewan yang terfasilitasi mengikuti pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%	0	0	0	30	30	30	40	
7	Persentase pembahasan kerja sama daerah	%	0	0	0	30	30	30	40	
8	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global maupun nasional, maka dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengarusutamaan pembangunan yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Gender dan inklusi sosial

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan seharusnya memastikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Selain itu perlu disediakan data terpilah gender dan sosial sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program.

2. Pembangunan berkelanjutan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dalam setiap program pembangunan daerah. Selain itu harus bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang ramah lingkungan dan berdaya tahan jangka panjang.

3. Transformasi digital

Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perumusan kebijakan berbasis data untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi DPRD.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendorong kebijakan dan program pembangunan daerah yang berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendukung penerapan ekonomi sirkular,

pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

5. Pembangunan berketahanan iklim

Kemampuan untuk mengarusutamakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah serta mendorong inovasi lokal untuk menjaga ketahanan pangan, air, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini, telah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dinas, badan, biro dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas dan kewenangannya yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, untuk membangun pemerintahan yang amanah, demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) disusun agar Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mampu memberikan pelayanan demi terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

PALEMBANG, 29 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



H. APRIZAL, S.Ag, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197204081998031005